BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan untuk mendukung perkembangan anak mencapai kedewasaannya dan dapat melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pendidikan ini merupakan awal yang sangat penting untuk seorang anak, karena melatih mereka untuk membaca dengan baik, mengasah kemampuan berhitung serta berpikir. Saat ini, pendidikan di sekolah dapat ditempuh oleh siapa pun dari berbagai kalangan dan golongan sebagai tempat atau sarana pendidikan. Berbagai kurikulum juga dikembangkan untuk sekolah agar dapat membantu anak dalam proses pembelajaran yang baik dan bermutu agar dapat membantu anak dalam proses pembelajaran yang baik dan bermutu.

Setiap anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan memiliki martabat dan harkat manusia seutuhnya. Anak-anak ABK memiliki kekurangan karena memiliki cacat fisik, mental, atau sosial. Dalam semua aspek kehidupan mereka, ABK memiliki hak yang sama dengan anak-anak biasa lainnya. Begitu pula dalam hal pembelajaran, mereka juga memiliki hak untuk pergi ke sekolah untuk mendapatkan pembelajaran. Memberikan ABK kesempatan yang sama untuk belajar dan belajar akan membantu mereka menjadi individu yang terdidik, mandiri, dan terampil.

Adapun Peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang mengenai Hak atas Pendidikan bagi ABK atau anak difabel ditetapkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pembelajaran Nasional Pasal 32 disebutkan bahwa:

> "Pendidikan khusus (Pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki Tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial".

Negara juga memberikan jaminan hak-hak bagi ABK untuk bersekolah disekolah regular sekalipun. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap warga Negara berhak menndapat Pendidikan".

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sebagai institusi yang bertanggung jawab meregulasi pembelajaran mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.70 Tahun 2009 tentang pembelajaran inklusif sebagai solusi atas terjadinya diskriminasi bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mampu mengenyam pembelajaran yang layak. Di Indonesia, pembelajaran khusus dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu pada satuan pendidikan akademis (sekolah luar biasa) dan pada sekolah reguler (program pembelajaran inklusif).

Sekolah inklusif memiliki jenis layanan yang berbeda dari sekolah khusus lainnya karena layanan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus terus berkembang. Pembelajaran inklusif adalah jenis pembelajaran di sekolah umum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan memerlukan Pembelajaran inklusif khusus secara sistematis. Pembelajaran inklusif juga merupakan jenis pembelajaran yang menghargai anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusif ini menekankan keterpaduan penuh dan pembelajaran untuk semua. Layanan pembelajaran ini diberikan di sekolah reguler. ABK belajar di kelas yang sama dengan siswa normal lainnya. Mereka diajarkan oleh guru yang sama, tetapi ada guru khusus yang bertanggung jawab untuk membantu anak penyandang disabilitas yang mengalami

kesulitan belajar. Anak-anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti anak-anak lainnya.

Sekolah inklusi memiliki layanan yang berbeda daripada sekolah khusus lainnya karena layanan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus terus berkembang. Pembelajaran inklusi adalah jenis pembelajaran di sekolah umum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memerlukan pembelajaran khusus secara sistemik. Jenis pembelajaran ini menghargai siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Sekolah inklusif ini menekankan keterpaduan penuh dan pembelajaran untuk semua. Layanan pembelajaran ini diberikan di sekolah reguler. ABK belajar di kelas yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Mereka diajarkan oleh guru yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak normal lainnya.

Pembelajaran inklusi mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1998; berarti telah 20 tahun yang lalu. Pada thun 2009, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri pembelajaran Nasional No. 70 tentang pembelajaran inklusif untuk tingkat pembelajaran dasar dan menengah. Namun, hingga kini Pembangunan sistem pembelajaran inkusif belum pernah terwujud. Di Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, penerapan pembelajaran inklusif di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi isu yang krusial. Sebagai pusat pembelajaran di Sumatera Utara, Medan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas dan inklusif bagi semua siswa, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Dari hasil observasi di lapangan, banyak SMPN di Kota Medan yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam menyediakan infrastuktur, kurikulum,

penyediaan dana dan ketidaksediaan peserta didik ABK yang mendukung pembelajaran inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah menengah pertama di kota madya Medan cukup siap untuk menerapkan pembelajaran inklusif. Sekolah dalam hal ini kurang memahami bagaimana cara menerapkan pembelajaran inklusif bahkan pemerintah daerah kurang dalam memberikan partisipasi

Misalnya, di SMPN 21 Medan, terdapat anak berkebutuhan khusus disekolah tersebut tetapi kekurangan fasilitas yang belum tersedia. Selain sekolah tersebut adapun beberapa sekolah yang lain masih terhambat dalam proses penerapan Pembelajaran inklusif meliputi aspek peserta didik, tenaga kependidikan, bahkan fasilitas.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pengambil kebijakan, staf sekolah, dan komunitas pembelajaran tentang pentingnya. Dari berbagai hal inilah, peneliti tertarik untuk meneliti kesiapan sekolah dalam penerapan Pembelajaran inklusif yang telah dilakukan kota Medan. **"Kesiapan Sekolah dalam Penerapan Pembelajaran inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Pertama Se Kota Medan".**

1.2 Identifikasi Masalah

1) Kesiapan sekolah masih kurang, termasuk ketersediaan sumber daya fisik, dukungan dari staf pengajar dan administrasi, serta komitmen sekolah secara keseluruhan.
2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang Pembelajaran inklusif di kalangan peserta didik, orang tua, dan masyakarat.

3) Belum semua guru regular memiliki kompetensi memberikan layanan ABK dan masih minimnya guru khusus di sekolah inklusif, meskipun bukan suatu keharusan (identik) antara guru khusus dan sekolah inklusif.
4) Tidak memadainya sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran inklusif, seperti kurangnya ruang khusus dan alat bantu pembelajaran.
5) Ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus, serta kurangnya integrasi nilai-nilai inklusif dalam kurikulum yang ada.
6) Keterbatasan anggaran dalam mengembangkan program pembelajaran inklusif yang efektif. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya fisik, dukungan staf, dan pelatihan yang diperlukan untuk menerapkan pendekatan inklusif yang efektif.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini untuk menghindari kesimpangsiuran, maka penulis membatasi permasalahan mengenai "Kesiapan Sekolah dalam Penerapan Pembelajaran inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Medan".

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Dalam konteks kesiapan sekolah dalam penerapan pembelajaran inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), terdapat beberapa masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini:

1. Bagaimana kesiapan kurikulum di SMPN Medan dalam menerapkan pembelajaran inklusif?

2. Bagaimana kesiapan tenaga ke pembelajaran di SMPN Kota Medan dalam menerapkan pembelajaran inklusif bagi ABK?
3. Bagaimana kesiapan sarana-prasarana di SMPN Kota Medan dalam menerapkan pembelajaran inklusif bagi ABK?
4. Bagaimana kesiapan manajemen sekolah untuk menerapkan Pembelajaran inklusif bagi anak berkebutuhan khusus?
5. Bagaimana alokasi dana dalam mendukung penerapan pembelajaran bagi ABK SMPN di Kota Medan?
6. Bagaimana kesiapan peserta didik di SMPN Medan dalam memahami dan menerima keberagaman dalam konteks penerapan Pembelajaran inklusif?
7. Bagaimana kesiapan sekolah memastikan adanya lingkungan yang aman dan mendukung kebutuhan ABK?
8. Bagaimana adaptasi kurikulum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ABK dalam proses belajar-mengajar?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh gambaran mengenai hal-hal berikut.

1. Untuk mendeskripsikan kesiapan kurikulum SMPN Medan dalam menyediakan materi Pembelajaran inklusif bagi ABK
2. Untuk Mendeskripsikan kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran yang inklusif dalam mendukung kebutuhan individu peserta didik
3. Untuk Mendeskripsikan kesiapan dari sarana-prasarana SMPN Medan dalam menyediakan fasilitas untuk penerapan pembelajaran inkusif

4. Mendeskripsikan kesiapan manajemen sekolah dalam mengelola program Pembelajaran inklusif di sekolah.
5. Mendeskripsikan kesiapan dana untuk menyediakan fasilitas, peralatan dan sumber daya yang diperlukan.
6. Untuk mengetahui kesiapan dari ketersediaan peserta didik dalam menerapkan Pembelajaran inklusif bagi ABK.
7. Untuk mengetahui gambaran kesiapan sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi ABK.
8. Untuk Mendeskripsikan kesiapan dari proses belajar-mengajar dalam menjalankan proses pembelajaran inklusif bagi ABK.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Teoritis

a) Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran inklusif, khususnya terkait strategi dan model implementasi pembelajaran yang efektif untuk ABK di Tingkat SMP.

b) Hasil penelitian dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang terkait dengan pendidikan inklusif, baik dalam konteks kebijakan, pelaksanaan, maupun evaluasi keberhasilan.

c) Memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, termasuk aspek infrastruktur, tenaga pendidik, kurikulum, dan budaya sekolah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Kepala Sekolah

Memberikan saran kepada sekolah-sekolah di Kota Medan tentang apa yang bisa dilakukan agar lebih siap mendukung anak berkebutuhan khusus, seperti pelatihan guru atau menyediakan fasilitas khusus.

b) Bagi Guru bimbingan konseling

Membantu guru memahami kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dan memberikan ide tentang cara mengajar yang lebih sesuai untuk mereka.

c) Bagi Pemerintah Daerah

Menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Kota Medan untuk menyusun kebijakan yang mendukung implementasi pendidikan inklusif di seluruh SMP Negeri.

d) Bagi Siswa

Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, nyaman, dan mendukung potensi setiap siswa, baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran.

e) Bagi Orang tua

Mendapat rujukan cara meneliti mengenai pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap etika berbicara pada siswa